



RENSTRA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH (BPKPAD)**

KAB. MAMUJU TENGAH

2025 - 2029



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan urusan; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan Renstra PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan Renstra PD;
 - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra PD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala badan yang membidangi urusan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas karunia nikmat iman dan kesehatan hingga sampai hari ini sehingga bisa menyelesaikan Ranwal Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah.

Renstra merupakan dokumen yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di periode 2025-2029.

Disamping itu, didalam dokumen Renstra memuat tentang sasaran kegiatan berupa indicator outcome, output kegiatan sebagai upaya untuk Menyusun dokumen perencanaan terpadu dan berorientasi pada output (hasil).

Penyusunan Renstra secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah bisa diselesaikan dengan baik, dan kami sadari bahwa dokumen Renstra BPKPAD ini masih butuh

penyempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan dokumen Renstra kami agar menjadi dokumen benar-benar menjadi panduan serta acuan bagi staf BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 31 Oktober 2025

Kepala BPKPAD Kab. Mamuju Tengah



IMANSYAH, S.Kom., MM
Nip. 198001012009011025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.2 Kinerja Pelayanan BPKPAD.....	20
2.3 Kelompok Sasaran Pelayanan BPKPAD.....	23
2.4 Mitra BPKPAD Dalam Pemberian Pelayanan.....	25
2.5 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja BPKPAD.....	26
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
3.1 Tujuan Dan Sasaran.....	31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
BAB V PENUTUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Tingkat Pendidikan-Unit Kerja.....	17
Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Golongan-Unit Kerja.....	17
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPKPAD.....	18
Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama BPKPAD Periode 2020-2024.....	20
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra BPKPAD	33
Tabel 3. 2 Tahapan Renstra BPKPAD.....	35
Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra BPKPAD.....	36
Tabel 4. 1 Rumusan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah.....	37
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	67
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	102
Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimana dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1), renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoma kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai target-target kinerja.

Pada ketentuan lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional maupun global dan tetap berada pada tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis yang dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sistem perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan : rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah adalah dokumen perencanaan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD Kab. Mamuju

Tengah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Renstra berfungsi sebagai alat kontrol atas semua aktivitas yang sedang maupun yang akan datang serta sebagai sarana dalam meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025-2029 merupakan landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Mamuju Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2025-2029 dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang disesuaikan dengan kewenangan atau fungsi dari perangkat daerah dalam hal ini BPKPAD sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Oleh karena itu, dengan adanya Renstra BPKPAD diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu dalam aspek keuangan, pendapatan dan aset daerah sebagai program prioritas daerah dalam mendukung visi pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah yang agropolitan maju, sejahtera dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada beberapa peraturan dan kebijakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3) Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);;
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - 18) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 20) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 21) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025-2030 adalah sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjelaskan arah kebijakan dan strategi BPKPAD selama lima tahun ke depan dan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan yang ada di BPKPAD terkhusus di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya bisa terlaksana secara optimal dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program BPKPAD periode lima tahun;
- b. Merumuskan ukuran keberhasilan perangkat daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
- c. Merumuskan kerangka pendanaan pagu indikatif periode lima tahun;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPKPAD;
- e. Menyediakan dasar bagi pengukuran kinerja dan akuntabilitas BPKPAD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra BPKPAD periode 2025-2029 terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk berdasarkan :

- 1). Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- 2). Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Pasal 392 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang keuangan.

BPKPAD dalam melaksanakan tugas pada Pasal 393 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1). Pengelolaan anggaran daerah;

- 2). Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- 3). Penyusunan kebijakan pengelolaan BMD;
- 4). Penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan BMD;
- 5). Pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- 6). Penilaian barang milik Daerah;
- 7). Perbendaharaan Daerah; dan
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris bertugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c) Penyelenggaraan urusan umum;
 - d) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - e) Penyelenggaraan urusan keuangan;
 - f) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g) Pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
 - h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Bidang Anggaran:

- a) Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- b) Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- c) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- d) Penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e) Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- f) Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- g) Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- h) Penyediaan anggaran kas; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggarann terdiri atas dua sub bidang yaitu:

- (1) Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggggaran Daerah
- (2) Sub Bidang Data, Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan APBD

3) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perbendaharaan pemerintah daerah, Akuntansi dan Pelaporan. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, mempunyai fungsi:

- a) Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- b) Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- c) Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- d) Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- e) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- f) Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- h) Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- i) Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- k) Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- l) Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- m) Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n) Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;

- o) Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- p) Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- q) Pelaksanaan sidang majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi);
- r) Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- s) Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- t) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- u) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- v) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- w) Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- x) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- y) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perbendaharaan terbagi atas dua sub bidang yaitu:

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Kas dan Belanja Daerah
- (2) Sub Bidang Akuntansi

4) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pengelolaan BMD. Pasal 410 Bidang Pengelolaan BMD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b) Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c) Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- e) Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g) Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h) Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- i) Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k) Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- l) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki dua (2) sub bidang yaitu:

- (1) Sub Bidang Perencanaan Dan Analisis Barang Milik Daerah
- (2) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

5) Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

- a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah melaksanakan tugas Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah melaksanakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b) Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - d) Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - f) Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g) Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - h) Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - i) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - j) Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - k) Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
 - l) Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m) Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;

- n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas dua sub bidang yaitu:

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah
- (2) Sub Bidang Evaluasi Dan Pengawasan Pendapatan

6) Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

- a.** Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa Potensi Pendapatan, Pendataan, penetapan, Pemungutan Pajak Daerah dan Melakukan verifikasi dan pengawasan penerimaan/pendapatan Asli Daerah.
- b.** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melaksanakan fungsi:
 - a) Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - e) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
 - f) Pelaporan pendapatan daerah;
 - g) Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas dua (2) sub bidang yaitu:
- (1) Sub Bidang Pajak Daerah
 - (2) Sub Bidang Retribusi Daerah

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kondisi Umum Pegawai

1). Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan-Unit Kerja

Dalam menjalankan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah didukung oleh sumber daya sebanyak 94 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 29 orang, PPPK 3 orang dan Non Pegawai Negeri 62 orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Tingkat Pendidikan-Unit Kerja

Tingkat Pendidikan	Unit Kerja													Total
	Kepala	Sekretariat		Bidang Anggaran		Bidang Perbendaharaan		Bidang Aset		Bidang Perencanaan PAD		Bidang Pengelolaan PAD		
	PS	PS	NonPS	PS	NonPS	PS	NonPS	PS	NonPS	PS	NonPS	PS	NonPS	
SA			2		2		1		1		4		2	12
DII							2		1					3
SI		5	10	3	8	5	6	3	7	3	6	4	7	67
S2	1	2	1	2		2	1	2					1	12
	Jumlah													94

2) Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan-Unit Kerja

Klasifikasi Pegawai berdasarkan golongan-unit kerja bisa dijelaskan melalui table dibawah ini.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Golongan-Unit Kerja

Golongan	Unit Kerja							Total
	Kepala	Sekretariat	Bidang Anggaran	Bidang Perbendaharaan	Bidang Aset	Bidang Perencanaan PAD	Bidang Pengelolaan PAD	
II d					1			1
III.a		1	2	3	1	1		8
III.b		1		1				2
III.c		2	2	2	1		1	8
III.d					2	1	2	5
IV.a		1	1	1		1		4
IV.b	1							1
V							1	1
IX		2						2
Jumlah								32

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah ditunjang dengan tersedianya gedung

kantor dan perlengkapan kantor, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPKPAD

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	Kendaraan Roda Empat	2 Buah	√		
2	Kendaraan Roda Dua	31 Buah	28	3	RB
3	Mesing Penghitung Uang	1 Buah	√		
4	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1 Buah	√		
5	Lemari Besi / Metal	7 Buah	√		
6	Lemari Kayu	17 Buah	√		
7	Lemari Kaca	5 Buah	√		
8	Papan Visual / Papan Nama	14 Buah	√		
9	Papan Nama Instansi /Penanda	51 Buah	√		
10	Papan Plang	12 Buah	√		
11	Videotron	1 Buah	√		
12	Meja Kerja Kayu	34 Buah	33	1	
13	Bangku Panjang Besi	2 Buah	1	1	RB
14	Filing Cabinet Besi	2 Buah	√		
15	Brandkas	1 Buah	√		
16	Lemari Kaca	5 Buah	√		
17	Papan Visual/Papan Nama	14 Buah	√		
18	Alat Penghancur Kertas	1 Buah	√		
19	Perforator Besar	1 Buah	√		
20	Mesin Laminating	1 Buah	√		
21	LCD Projector/Infocus	1 Buah	√		
22	Kotak Surat	1 Buah	√		
23	Papan Nama Instansi	51 Buah	√		
24	Papan Pengumuman	12 Buah	√		
25	Videotron	1 Buah	√		
26	Meja Kerja Kayu	34 Buah	√		
27	Bangku Panjang Besi/Metal	2 Buah	1	1	RB
28	Meja Rapat	2 Buah	√		
29	Meja Panjang	1 Buah	√		
30	Kursi Putar	1 Buah	√		
31	Kursi Biasa	42 Buah	√		
32	Bangku Tunggu	2 Buah	√		

33	Sofa	3 Buah	√		
34	A.C. Window	1 Buah	√		
35	A.C. Split	8 Buah	√		
36	Kipas Angin	6 Buah	1	5	RB
37	Exhaust Fan	1 Buah	√		
38	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 Buah	√		
39	Rice Warmer	1 Buah	√		
40	Alat Dapur Lain-Lain				
41	Televisi	2 Buah	√		
42	Sound System	1 Buah	√		
43	Wireless	9 Buah			
44	Megaphone	1 Buah	√		
45	Camera Video	1 Buah	√		
46	Gordiyin/Kray	2 Buah	√		
47	Tangga	1 Buah	√		
48	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain				
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	√		
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 Buah	6	1	RB
51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Buah	√		
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah	√		
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Buah	√		
54	Kursi Kerja	12 Buah	√		
55	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	28 Buah	√		
56	Buffet Kaca	5 Buah	√		
57	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1 Buah	√		
58	Layar Film/Projector	2 Buah	√		
59	Camera Tune Simulator	1 Buah	√		
60	Mesin Jilid	1 Buah	√		
61	Telephone Mobile	1 Buah	√		
62	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	1 Buah	√		
63	Video Printer	4 Buah	√		
64	Adaptor	30 Buah			
65	Portable Router	5 Buah		5	RB
66	GPS	2 Buah	√		
67	Finger Print Camera	1 Buah		1	RB
68	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 Buah	√		
69	P.C Unit	42 Buah	33	2	7 TK
70	Lap Top	39 Buah	35	4	RB

71	Note Book	18 Buah	6	12	RB
72	Tablet PC	1 Buah	√		
73	Hard Disk	11 Buah	10	1	RB
74	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Buah	√		
75	Monitor	1 Buah	√		
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	75 Buah	√		
77	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 Buah	√		
78	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1 Buah	√		
79	External CD/ DVD Drive (ROM)	2 Buah			
80	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	10 Buah	√		
81	Server	6 Buah	3	3	RB
82	Router	2 Buah		2	RB
83	Hub	7 Buah	√		
84	Modem	1 Buah		1	RB
85	Peralatan Jaringan Lain-Lain	18 Buah		18	RB
86	Alat Tennis Meja	1 Buah	√		

2.2 Kinerja Pelayanan BPKPAD

**Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama BPKPAD
Periode 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET						REALISASI					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	%	Jumlah dokumen anggaran yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan anggaran	Bidang Anggaran, Bagian Perencanaan	97,85%	98,71%	100%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	100%		
			Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dibagi Jumlah OPD dikali 100%	Bidang Perbendaharaan	87%	88%	89%	90%	93%	95%	86%	87%	88%	100%		
			Persentase perangkat daerah yang penataan asetnya sesuai aturan	%	Jumlah OPD yang melakukan penataan aset yang baik dibagi jumlah OPD dikali 100%	Bidang Aset	79,10%	82,00%	85,30%	85,80%	86,00%	87,00%	79%	82%	85%	86%		
2		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Realisasi PAD tahun ini dikurangi PAD tahun sebelumnya dibagi PAD tahun lalu dikali 100%	Bidang Perencanaan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendapatan	10%	11%	12%	13%	14%	15%	21,41%	-9,21%	29%	21%		

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Pada setiap tahunnya, sebagian besar target kinerja berhasil dicapai melalui optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta peningkatan koordinasi antarbidang.

Bidang pendapatan berhasil meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, sementara bidang anggaran dan perbendaharaan memperkuat disiplin fiskal serta efisiensi belanja daerah. Di sisi lain, bidang aset berfokus pada validasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai kekayaan daerah yang tertata dan produktif.

Secara keseluruhan, capaian IKU mencerminkan kinerja BPKPAD yang semakin akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya perbaikan berkelanjutan tetap dilakukan untuk menjaga konsistensi kinerja di tahun-tahun mendatang, termasuk peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, penguatan sistem pengendalian internal serta pengelolaan potensi PAD untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Tabel 2.5 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD Tahun 2020-2025

INDIKATOR	FORMULASI		TARGET						REALISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	X 100 %	20,00	21,00	23,00	25,00	27,00	31,00			22,94	26,07	29,83	
	Jumlah APBD													

Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah Pendapatan pada APBD	X 100 %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,30	5,29	5,02	6,43	7,77	
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures Jumlah Belanja APBD	X 100 %	65,00	64,00	63,00	62,00	61,00	60,00	64,35	62,54	63,27	61,26	61,28	
Opini Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi Total belanja APBD	X 100 %	97,00	96,00	95,00	94,00	95,00	96,00	97,37	94,99	95,15	92,36	97,44	
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD	X 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00	100,98	92,67	99,27	99,55	
Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap ? (Ya/Tidak)		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA total belanja anggaran tahun sebelumnya	X 100 %	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,79	2,11	2,36	1,03	6,55	

Realisasi indikator kinerja kunci pada BPKPAD Kab. Mamuju Tengah merupakan cerminan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien.

Pada tabel 2.5 rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai serta penyesuaian tunjangan kinerja sesuai kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan belanja

pegawai pada perangkat daerah non-pendidikan dan non-kesehatan.

Untuk Capaian kinerja indikator rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi terhadap target anggaran menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Selain itu, peningkatan rasio realisasi PAD juga menggambarkan efektivitas strategi pemungutan dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah yang dilaksanakan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Tren peningkatan rasio realisasi PAD mengindikasikan semakin baiknya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dalam mendukung kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum realisasi indikator kinerja kunci Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menunjukkan capaian yang positif dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah dan pengelolaan asset yang semakin tertib dan akuntabel .

2.3 Kelompok Sasaran Pelayanan BPKPAD

Kelompok sasaran pelayanan BPKPAD merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Sasaran pelayanan mencakup

perangkat daerah, masyarakat, wajib pajak serta Lembaga pengawasan dan pemangku kepentingan.

Adapun kelompok sasaran pelayanan pada masing-masing bidang dilingkungan BPKPAD yakni sebagai berikut:

1). Bidang Pendapatan Daerah meliputi :

- a) Wajib pajak/retribusi daerah baik perseorangan maupun badan usaha sebagai penerima layanan administrasi penetapan, penagihan dan pembayaran pajak/retribusi daerah;
- b) Perangkat Daerah pengelola pendapatan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah;
- c) Masyarakat umum sebagai pihak yang merasakan manfaat penerimaan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan public;
- d) Pemerintah pusat dan Lembaga pengawasan yang memerlukan data dan laporan realisasi pendapatan daerah untuk kepentingan evaluasi dan pembinaan

2). Bidang Anggaran meliputi :

- a) Perangkat Daerah sebagai pengguna utama layanan penyusunan, penelaahan dan evaluasi dokumen RKA serta APBD;
- b) Pimpinan Daerah dan DPRD sebagai pihak yang memerlukan dukungan data, informasi dan analisis kebijakan anggaran perencanaan dan pengambilan keputusan;
- c) Pemerintah Pusat sebagai penerima laporan data keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan fiskal;
- d) Masyarakat sebagai pihak yang memperoleh informasi terkait kebijakan alokasi dan penggunaan anggaran secara transparan.

3). Bidang Perbendaharaan meliputi :

- a) Perangkat Daerah, sebagai penerima layanan pengelolaan kas, penyaluran dana, verifikasi SPM, dan penatausahaan keuangan daerah serta sebagai entitas pelapor yang memperoleh layanan pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan;
 - b) Pihak ketiga atau penyedia barang/jasa, sebagai penerima manfaat dari proses pembayaran yang tertib administrasi dan tepat waktu;
 - c) Lembaga keuangan dan perbankan, sebagai mitra kerja dalam pengelolaan rekening kas umum daerah serta pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah;
 - d) Pimpinan daerah dan DPRD sebagai pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan strategis daerah;
 - e) Lembaga pengawas dan pemeriksa, seperti BPK dan Inspektorat, sebagai pengguna data dan laporan keuangan untuk kepentingan audit dan evaluasi.
- 4). Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
- a) Seluruh perangkat daerah sebagai pengguna barang milik daerah yang memerlukan layanan inventarisasi, penilaian, pemanfaatan dan penghapusan asset;
 - b) Masyarakat dan dunia usaha yang dapat memanfaatkan asset daerah melalui mekanisme kerja sama, sewa atau pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pemerintah pusat dan Lembaga pengawas sebagai pengguna data dan laporan asset daerah untuk pembinaan serta pengawasan pengelolaan barang milik daerah.

2.4 Mitra BPKPAD Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tujuan dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah, BPKPAD menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai mitra strategis baik internal pemerintah daerah maupun eksternal.

Mitra internal meliputi perangkat daerah lainnya, terutama yakni :

- a) Bappeda Litbang, dalam perencanaan dan sinkronisasi program serta penyusunan anggaran;
- b) Inspektorat Daerah, dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- c) BKPSDM dan Sekretariat Daerah, dalam dukungan administrasi dan pelaksanaan kebijakan keuangan;
- d) Seluruh Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan, pengelolaan asset, pendapatan dan pelaporan keuangan daerah.

Mitra eksternal meliputi sebagai berikut :

- a) Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra pengelolaan kas daerah dan transaksi non tunai;
- b) Masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah, sebagai pengguna layanan pendapatan daerah;
- c) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI sebagai Lembaga pemeriksa eksternal atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- d) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal kebijakan fiskal dan koordinasi pengelolaan dana transfer serta piutang pajak daerah.

2.5 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja BPKPAD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan mitra strategis yang berperan dalam mendukung pencapaian kinerja BPKPAD

melalui kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyetoran dividen, bagi hasil usaha, serta kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran kewajiban keuangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga berperan penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan kas daerah dan pelayanan keuangan pemerintah daerah.

Di samping itu, BUMD turut berkontribusi dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama pemanfaatan aset serta investasi yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Sinergi antara BPKPAD dan BUMD tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD

BPKPAD sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang keuangan tentu menghadapi berbagai permasalahan, Adapun permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.6 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah Dan Akar Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Keterbatasan dan kapasitas fiskal	Program dan kegiatan tidak berjalan maksimal	Keuangan pusat terbatas dalam mendanai anggaran belanja daerah
2.	Belum optimalnya pelaksanaan system informasi keuangan berbasis digital	Beberapa kegiatan informasi keuangan daerah masih manual	Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan system informasi keuangan berbasis digital
		Masih tingginya data pelayanan administrasi, pendataan dan pendaftaran pajak daerah secara langsung	Pemahaman masyarakat Mamuju Tengah belum merata terkait penggunaan teknologi pelayanan pajak daerah
3.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah	- Banyak masyarakat yang keberatan dengan pengenaan pajak yang dibebankan kepadanya bahkan menghindari Ketika dimintai informasi	- Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang pajak yang menjadi kewajibannya

Identifikasi isu strategis bertujuan untuk menganalisis dan menetapkan masalah prioritas yang signifikan dan berdampak pada kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sehingga bisa focus pada perbaikan dan pengembangan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan

mendukung terciptanya pembanguna daerah dan pelayanan masyarakat yang optimal.

Tabel 2.7 Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isi KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Menguatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran	- Keterbatasan Sumber Daya Manusia di beberapa bidang - Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak - Belum merata pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital transaksi pembayaran Pajak Daerah; - Belum tersedianya infrastruktur database Pajak Daerah yang terintegrasi by NIK; - Mengelola defisit anggaran yang berkelanjutan; - Utang Daerah: Mengelola utang Daerah yang fluktuatif.		Penggunaan Sistem Keuangan Digital	Hilirisasi Industri yang mengedepankan prinsip Green Economy dan Blue Economy	Sulawesi sebagai penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industro berbasis SDA	- Terbitnya Inpres no 1 Tahun 2025 Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak & Retribusi Daerah. - Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah - Validasi Data dan Penyesuaian NJOP PBBP2; - Database Pajak Daerah Terintegrasi by NIK Wajib Pajak; - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Pembayaran Pajak Daerah secara Digital yang menyeluruh; - GeoSpasial PBB-P2. - Penerapan SP2D online - Penerapan kebijakan akuntansi terbaru terhadap LKPD - Penerapan Aplikasi Silincak untuk mendukung proses verifikasi dokumen SKPD secara online - Optimalisasi penerapan KKPD di setiap SKPD - Optimalisasi penerapan Aplikasi SIMGaji Berbasis WEB - Optimalisasi rekonsiliasi per Sumber Dana ke SKPD

						- Optimalisasi pelaporan pajak pusat - Keterbatasan dan Kapasitas Fiskal Daerah: Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk membiayai program dan kegiatan; - Prioritas Anggaran: Menentukan prioritas anggaran yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang termuat pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029. Dimana visi Kepala Daerah yang terpilih yakni “Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Adapun misi yang akan dijalankan untuk mencapai visi Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat transformasi sosial;
2. Memperkuat transformasi ekonomi;
3. Memperkuat transformasi tata kelola;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro;
5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata;
7. Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas;
8. Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah.

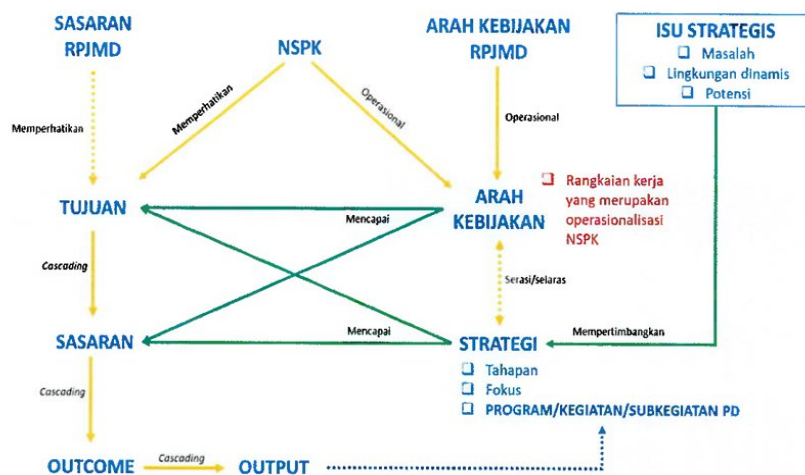
Tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah berkaitan dengan Misi ke tiga yakni memperkuat transformasi tata kelola dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif, kemudian dijabarkan kedalam beberapa sasaran yakni :

1. Meningkatnya kualitas produk hukum dan akuntabilitas pemerintah daerah. Indikator indeks reformasi hukum dan indeks kualitas kebijakan;

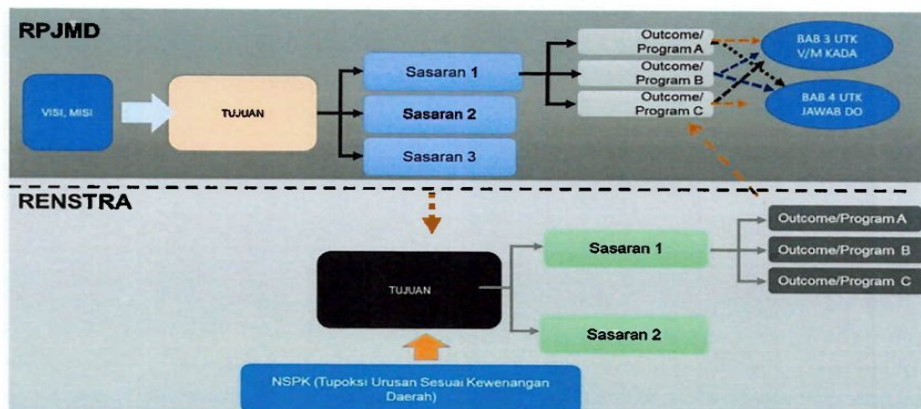
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan. Indikator opini BPK atas laporan keuangan;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator indeks pemerintahan digital;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator indeks pelayanan publik dan skor survey kepuasan masyarakat.

BPKPAD Mamuju Tengah mengampuh sasaran kedua yakni meningkatnya akuntabilitas keuangan dengan indiaktor opini BPK atas Laporan Keuangan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaram RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Dengan memperhatikan visi misi, tujuan dan sasaran maka dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra BPKPAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH											
- Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital - meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Aset, Pendapatan Daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan berbasis kinerja		Nilai IPKD (Nilai)	75	76	77	78	79	80	82	
		Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Pengalokasian Anggaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Persentase Aset Daerah yang Telah Terdata dan Tervalidasi dalam SIM-BMD (%)	70	75	80	85	90	95	100	
			Persentase Aset Idle Dimanfaatkan (%)	0	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	
			Persentase Nilai Aset yang Memiliki Legalitas (Sertifikat) (%)	0,75	1,12	2,99	5,60	9,33	13,81	19,40	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian fiskal	Indeks Kemandirian Fiskal (%)	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	9	10	11	12	13	14	15	
		Meningkatnya tatakelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD (Nilai)	70	72	75	78	80	82	85	
			Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada BPKPAD (%)	0	0	0	0	0	0	0	

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisi Langkah-langkah / upaya

yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam mencapai tujuan/sasaran Perangkat Daerah. Oleh karena itu, BPKPAD menyusun tahapan pembangunan agar bisa melihat prioritas-prioritas apa saja yang perlu dilaksanakan disetiap tahunnya.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan yang dibuat di masing-masing perangkat daerah. Dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi misi kepala daerah yang terpilih.

Rumusan strategi perangkat daerah umumnya menghadapi masalah baik lingkungan internal maupun eksternal, biasanya permasalahan yang muncul dilingkungan internal akan berpengaruh langsung pada kinerja organisasi dan bisa dikendalikan langsung oleh pimpinan dan jajarannya sedangkan masalah eksternal kadang berada diluar kendali organisasi. Oleh karena itu, BPKPAD perlu menyusun analisis faktor-faktor yang bisa menghambat dan mendukung keberhasilan organisasi dalam mendukung pembangunan daerah yang terkait dengan visi misi Kabupaten Mamuju Tengah.

Faktor-faktor yang menghambat diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang professional dibidangnya;

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan system pengelolaan keuangan berbasis elektronik;
3. Pemberlakuan reward dan punishment masih perlu ditingkatkan di BPKPAD

Faktor-faktor yang mendukung diantaranya :

1. Struktur organisasi yang mendukung;
2. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah disusun dengan baik;
3. Dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 3. 2 Tahapan Renstra BPKPAD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
- Penyelarasan regulasi dan kebijakan melalui Identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan terkait pengelolaan keuangan yang masih tumpang tindih atau belum optimal, penetapan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan untuk setiap perangkat daerah	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pelatihan komprehensif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan (perencana, bendahara, penatausahaan, pemeriksa) mengenai standar akuntansi pemerintah pengadaan berbasis elektronik, dan manajemen risiko keuangan pada seluruh Perangkat Daerah	- Mengoptimalkan digitalisasi melalui Implementasi penuh aplikasi SIPD secara terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan. - Penyesuaian proses penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)	- Mendorong akuntabilitas publik dan kontrol sosial terhadap keuangan daerah melalui publikasi dokumen APBD, realisasi anggaran, dan laporan keuangan secara berkala di website resmi daerah,	- Penguatan kelembagaan keuangan daerah melalui pembentukan pusat data dan informasi keuangan daerah,

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra BPKPAD

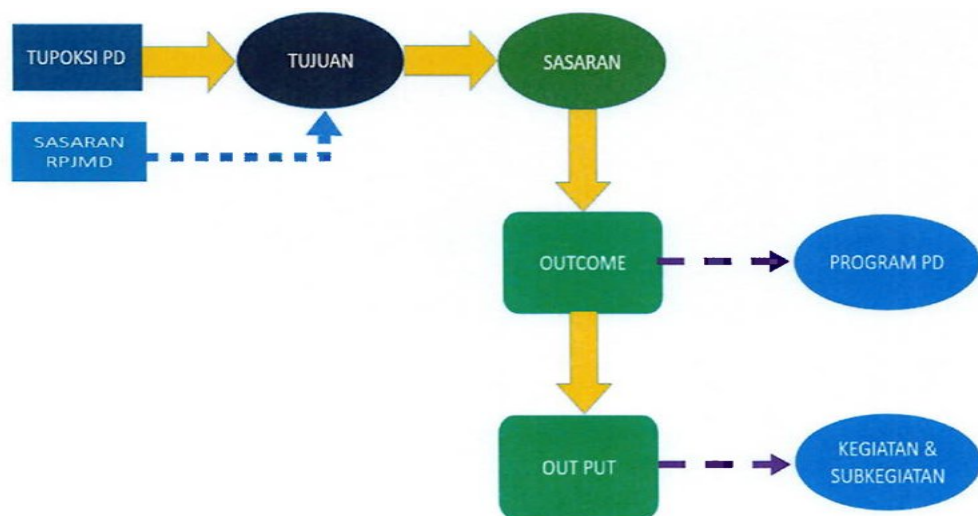
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	- Mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan berbasis kinerja serta terwujudnya pengelolaan keuangan berbasis aplikasi - Diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Renstra BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2025-2029 memuat 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 109 (Seratus Sembilan) Sub Kegiatan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4. 1 Rumusan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
- meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan - Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Aset, Pendapatan Daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan berbasis kinerja				Nilai IPKD (Nilai)		
		Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Ketepatan Pengalokasian Anggaran (%)		
					Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP (%)		
					Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap APBD (%)		
		Meningkatnya tata kelola anggaran			Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

				Terwujudnya kualitas penganggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Tersedianya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya implementasi sipd keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Persentase Peningkatan Efisiensi Transaksi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terwujudnya pelaporan keuangan berbasis aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Opini Laporan Keuangan (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	

					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD			Persentase Aset Daerah yang Telah Terdata dan Tervalidasi dalam SIM-BMD (%)		
					Persentase Aset Idle Dimanfaatkan (%)		
					Persentase Nilai Aset yang Memiliki Legalitas (Sertifikat) (%)		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase nilai pemanfaatan aset daerah terhadap PAD (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Manajemen Aset (Kategori)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

				Jumlah Peningkatan pemanfaatan aset terhadap pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

				Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
				Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian fiskal			Indeks Kemandirian Fiskal (%)		
					Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Tersedianya data potensi PAD yang valid dan konferenshif	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Rasio PAD (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Tersedianya data potensi PAD yang valid dan konferenshif	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

			Meningkatnya penerapan system informasi pengelolaan PAD berbasis digital		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Rasio Integrasi Sistem Pengelolaan PAD (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Tersedianya laporan pendapatan yang akurat dan transparan		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya tatakelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD			Nilai SAKIP BPKPAD (Nilai)		
					Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada BPKPAD (%)		
		Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten			Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							
- Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan - Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Aset, Pendapatan Daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan berbasis kinerja				Nilai IPKD (Nilai)		
		Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Ketepatan Pengalokasian Anggaran (%)		
					Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP (%)		
					Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap APBD (%)		
			Meningkatnya tata kelola anggaran		Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

					Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terwujudnya kualitas penganggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	

					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Tersedianya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya implementasi sipd keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				125.414.647.928,00		126.746.282.726,00		128.006.945.793,00		129.291.947.495,00		130.588.096.428,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.593.647.928,00		22.655.282.726,00		23.743.945.793,00		24.757.947.495,00		25.783.096.428,00		
Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	100	21.593.647.928,00	100	22.655.282.726,00	100	23.743.945.793,00	100	24.857.947.495,00	100	25.783.096.428,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	24.000.000,00	5	26.000.000,00	5	28.000.000,00	5	30.000.000,00	5	32.000.000,00	BPKPAD	

Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5	14.000.000,00	5	16.000.000,00	5	18.000.000,00	5	20.000.000,00	5	22.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	41.000.000,00	8	43.000.000,00	8	45.000.000,00	8	47.000.000,00	8	49.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				41.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		49.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	41.000.000,00	8	43.000.000,00	8	45.000.000,00	8	47.000.000,00	8	49.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000,00		9.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.000.000,00		9.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	5	14.000.000,00	5	16.000.000,00	5	18.000.000,00	5	20.000.000,00	5	22.000.000,00	BPKPAD	

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		43.000.000,00		46.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	34.000.000,00	5	37.000.000,00	5	40.000.000,00	5	43.000.000,00	5	46.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.999.647.928,00		20.998.282.726,00		22.024.945.793,00		22.976.947.495,00		23.941.096.428,00	BPKPAD	
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	35.000.000,00	2	37.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	20.000.000,00	3	25.000.000,00	3	27.000.000,00	3	30.000.000,00	3	32.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	36	20.021.647.928,00	40	21.014.282.726,00	42	22.037.945.793,00	45	22.985.947.495,00	45	23.948.096.428,00	BPKPAD	
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.951.647.928,00		20.943.282.726,00		21.964.945.793,00		22.911.947.495,00		23.872.096.428,00	BPKPAD	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	36	19.951.647.928,00	40	20.943.282.726,00	42	21.964.945.793,00	45	22.911.947.495,00	45	23.872.096.428,00	BPKPAD	
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	20.000.000,00	3	25.000.000,00	3	27.000.000,00	3	30.000.000,00	3	32.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				28.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00	BPKPAD	

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	35.000.000,00	2	37.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				38.000.000,00		42.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		54.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				258.000.000,00		267.000.000,00		276.000.000,00		285.000.000,00		294.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	10	115.000.000,00	10	117.000.000,00	10	119.000.000,00	10	121.000.000,00	10	123.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	5	43.000.000,00	5	45.000.000,00	5	47.000.000,00	5	49.000.000,00	5	51.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	56.000.000,00	12	58.000.000,00	12	60.000.000,00	12	62.000.000,00	12	64.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	34.000.000,00	2	36.000.000,00	2	38.000.000,00	2	40.000.000,00	2	42.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				115.000.000,00		117.000.000,00		119.000.000,00		121.000.000,00		123.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	10	115.000.000,00	10	117.000.000,00	10	119.000.000,00	10	121.000.000,00	10	123.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				56.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00		64.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	56.000.000,00	12	58.000.000,00	12	60.000.000,00	12	62.000.000,00	12	64.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	34.000.000,00	2	36.000.000,00	2	38.000.000,00	2	40.000.000,00	2	42.000.000,00	BPKPAD	

5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		49.000.000,00		51.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	5	43.000.000,00	5	45.000.000,00	5	47.000.000,00	5	49.000.000,00	5	51.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				205.000.000,00		212.000.000,00		219.000.000,00		226.000.000,00		233.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya adminitrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	112.000.000,00	100	114.000.000,00	100	116.000.000,00	100	118.000.000,00	100	120.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	8.000.000,00	5	9.000.000,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	30.000.000,00	12	32.000.000,00	12	34.000.000,00	12	36.000.000,00	12	38.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	30.000.000,00	5	32.000.000,00	5	34.000.000,00	5	36.000.000,00	5	38.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	30.000.000,00	5	32.000.000,00	5	34.000.000,00	5	36.000.000,00	5	38.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	30.000.000,00	12	32.000.000,00	12	34.000.000,00	12	36.000.000,00	12	38.000.000,00	BPKPAD	

5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.000.000,00		114.000.000,00		116.000.000,00		118.000.000,00		120.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	112.000.000,00	100	114.000.000,00	100	116.000.000,00	100	118.000.000,00	100	120.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	8.000.000,00	5	9.000.000,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				419.000.000,00		430.000.000,00		441.000.000,00		452.000.000,00		463.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	10	33.000.000,00	10	35.000.000,00	10	37.000.000,00	10	39.000.000,00	10	41.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	134.000.000,00	1	136.000.000,00	1	138.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10	22.000.000,00	10	24.000.000,00	10	26.000.000,00	10	28.000.000,00	10	30.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	60.000.000,00	2	62.000.000,00	2	64.000.000,00	2	66.000.000,00	2	68.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	164.000.000,00	2	166.000.000,00	2	168.000.000,00	2	170.000.000,00	2	172.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				164.000.000,00		166.000.000,00		168.000.000,00		170.000.000,00		172.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	164.000.000,00	2	166.000.000,00	2	168.000.000,00	2	170.000.000,00	2	172.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000,00		62.000.000,00		64.000.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	60.000.000,00	2	62.000.000,00	2	64.000.000,00	2	66.000.000,00	2	68.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10	22.000.000,00	10	24.000.000,00	10	26.000.000,00	10	28.000.000,00	10	30.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	10	33.000.000,00	10	35.000.000,00	10	37.000.000,00	10	39.000.000,00	10	41.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000,00		132.000.000,00		134.000.000,00		136.000.000,00		138.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	134.000.000,00	1	136.000.000,00	1	138.000.000,00	BPKPAD	

5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.000.000,00		232.000.000,00		235.000.000,00		238.000.000,00		240.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	152.000.000,00	1	153.000.000,00	1	154.000.000,00	1	155.000.000,00	1	156.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00	1	69.000.000,00	1	71.000.000,00	1	72.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		71.000.000,00		72.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00	1	69.000.000,00	1	71.000.000,00	1	72.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				152.000.000,00		153.000.000,00		154.000.000,00		155.000.000,00		156.000.000,00	BPKPAD	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	152.000.000,00	1	153.000.000,00	1	154.000.000,00	1	155.000.000,00	1	156.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340.000.000,00		355.000.000,00		369.000.000,00		383.000.000,00		397.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	25	145.000.000,00	25	147.000.000,00	25	149.000.000,00	25	151.000.000,00	25	153.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	4	35.000.000,00	4	37.000.000,00	4	39.000.000,00	4	41.000.000,00	4	43.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				145.000.000,00		147.000.000,00		149.000.000,00		151.000.000,00		153.000.000,00	BPKPAD	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	25	145.000.000,00	25	147.000.000,00	25	149.000.000,00	25	151.000.000,00	25	153.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	4	35.000.000,00	4	37.000.000,00	4	39.000.000,00	4	41.000.000,00	4	43.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	BPKPAD	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	BPKPAD	

5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				101.585.000.000,00		101.801.000.000,00		101.917.000.000,00		102.133.000.000,00		102.348.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	5,0	4,5	422.000.000,00	4,3	443.000.000,00	4,0	464.000.000,00	3,8	485.000.000,00	3,5	506.000.000,00	BPKPAD	
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD	100	100		100		100		100		100		BPKPAD	
	Opini Laporan Keuangan	9	11		12		13		14		15			
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				422.000.000,00		443.000.000,00		464.000.000,00		485.000.000,00		506.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	75	12.000.000,00	75	13.000.000,00	75	14.000.000,00	75	15.000.000,00	75	16.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	21.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00	2	29.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	120.000.000,00	2	122.000.000,00	2	124.000.000,00	2	126.000.000,00	2	128.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	125	125	17.000.000,00	125	19.000.000,00	125	21.000.000,00	125	23.000.000,00	125	25.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	146.000.000,00	2	148.000.000,00	2	150.000.000,00	2	152.000.000,00	2	154.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	21.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00	2	29.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				146.000.000,00		148.000.000,00		150.000.000,00		152.000.000,00		154.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	146.000.000,00	2	148.000.000,00	2	150.000.000,00	2	152.000.000,00	2	154.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				120.000.000,00		122.000.000,00		124.000.000,00		126.000.000,00		128.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	120.000.000,00	2	122.000.000,00	2	124.000.000,00	2	126.000.000,00	2	128.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	

Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	125	125	17.000.000,00	125	19.000.000,00	125	21.000.000,00	125	23.000.000,00	125	25.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	75	12.000.000,00	75	13.000.000,00	75	14.000.000,00	75	15.000.000,00	75	16.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	BPKPAD	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	31:33	28:30	100.736.000.000,00	27:29	100.909.000.000,00	26:28	100.982.000.000,00	25:27	101.155.000.000,00	24:26	101.328.000.000,00	BPKPAD	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum Dikurangi tranfer expenditures) (%)	61	58		56		54		52		50		BPKPAD	
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.341.000.000,00		1.359.000.000,00		1.377.000.000,00		1.395.000.000,00		1.413.000.000,00	BPKPAD	
Terwujudnya kualitas penganggaran daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41	41	26.000.000,00	41	28.000.000,00	41	30.000.000,00	41	32.000.000,00	41	34.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	35.000.000,00	2	37.000.000,00	2	39.000.000,00	2	41.000.000,00	2	43.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	35.000.000,00	2	37.000.000,00	2	39.000.000,00	2	41.000.000,00	2	43.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	750.000.000,00	2	752.000.000,00	2	754.000.000,00	2	756.000.000,00	2	758.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	300.000.000,00	2	302.000.000,00	2	304.000.000,00	2	306.000.000,00	2	308.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41	41	55.000.000,00	41	57.000.000,00	41	59.000.000,00	41	61.000.000,00	41	63.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41	41	45.000.000,00	41	47.000.000,00	41	49.000.000,00	41	51.000.000,00	41	53.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41	41	45.000.000,00	41	47.000.000,00	41	49.000.000,00	41	51.000.000,00	41	53.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	35.000.000,00	2	37.000.000,00	2	39.000.000,00	2	41.000.000,00	2	43.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	35.000.000,00	2	37.000.000,00	2	39.000.000,00	2	41.000.000,00	2	43.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				45.000.000,00		47.000.000,00		49.000.000,00		51.000.000,00		53.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41	41	45.000.000,00	41	47.000.000,00	41	49.000.000,00	41	51.000.000,00	41	53.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				45.000.000,00		47.000.000,00		49.000.000,00		51.000.000,00		53.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41	41	45.000.000,00	41	47.000.000,00	41	49.000.000,00	41	51.000.000,00	41	53.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41	41	26.000.000,00	41	28.000.000,00	41	30.000.000,00	41	32.000.000,00	41	34.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				55.000.000,00		57.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00		63.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41	41	55.000.000,00	41	57.000.000,00	41	59.000.000,00	41	61.000.000,00	41	63.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				750.000.000,00		752.000.000,00		754.000.000,00		756.000.000,00		758.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	750.000.000,00	2	752.000.000,00	2	754.000.000,00	2	756.000.000,00	2	758.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				300.000.000,00		302.000.000,00		304.000.000,00		306.000.000,00		308.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	300.000.000,00	2	302.000.000,00	2	304.000.000,00	2	306.000.000,00	2	308.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				99.150.000.000,00		99.300.000.000,00		99.350.000.000,00		99.500.000.000,00		99.650.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1	87.600.000.000,00	1	87.700.000.000,00	1	87.700.000.000,00	1	87.800.000.000,00	1	87.900.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	11.150.000.000,00	1	11.200.000.000,00	1	11.250.000.000,00	1	11.300.000.000,00	1	11.350.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	BPKPAD	
Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				87.600.000.000,00		87.700.000.000,00		87.700.000.000,00		87.800.000.000,00		87.900.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1	87.600.000.000,00	1	87.700.000.000,00	1	87.700.000.000,00	1	87.800.000.000,00	1	87.900.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				11.150.000.000,00		11.200.000.000,00		11.250.000.000,00		11.300.000.000,00		11.350.000.000,00	BPKPAD	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	11.150.000.000,00	1	11.200.000.000,00	1	11.250.000.000,00	1	11.300.000.000,00	1	11.350.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	BPKPAD	
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				245.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya implementasi sipd keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	134.000.000,00	1	136.000.000,00	1	138.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00	1	69.000.000,00	1	71.000.000,00	1	73.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150	150		150		150		150		150			
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		71.000.000,00		73.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00	1	69.000.000,00	1	71.000.000,00	1	73.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				130.000.000,00		132.000.000,00		134.000.000,00		136.000.000,00		138.000.000,00	BPKPAD	

Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	134.000.000,00	1	136.000.000,00	1	138.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)				50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150	150	50.000.000,00	150	51.000.000,00	150	52.000.000,00	150	53.000.000,00	150	54.000.000,00	BPKPAD	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA	60	57	427.000.000,00	55	449.000.000,00	50	471.000.000,00	48	493.000.000,00	45	514.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				427.000.000,00		449.000.000,00		471.000.000,00		493.000.000,00		514.000.000,00	BPKPAD	
Terwujudnya pelaporan keuangan berbasis aplikasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2	2	113.000.000,00	2	115.000.000,00	2	117.000.000,00	2	119.000.000,00	2	121.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0		12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	4	28.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	5	36.000.000,00	5	38.000.000,00	5	40.000.000,00	5	42.000.000,00	5	44.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	132.000.000,00	12	134.000.000,00	12	136.000.000,00	12	138.000.000,00	12	140.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	4	13.000.000,00	4	15.000.000,00	4	17.000.000,00	4	19.000.000,00	4	21.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	125	45.000.000,00	125	47.000.000,00	125	49.000.000,00	125	51.000.000,00	125	52.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				132.000.000,00		134.000.000,00		136.000.000,00		138.000.000,00		140.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	132.000.000,00	12	134.000.000,00	12	136.000.000,00	12	138.000.000,00	12	140.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	4	13.000.000,00	4	15.000.000,00	4	17.000.000,00	4	19.000.000,00	4	21.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		44.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	5	36.000.000,00	5	38.000.000,00	5	40.000.000,00	5	42.000.000,00	5	44.000.000,00	BPKPAD	

5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				113.000.000,00		115.000.000,00		117.000.000,00		119.000.000,00		121.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	2	113.000.000,00	2	115.000.000,00	2	117.000.000,00	2	119.000.000,00	2	121.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	4	28.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0		12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				45.000.000,00		47.000.000,00		49.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	125	45.000.000,00	125	47.000.000,00	125	49.000.000,00	125	51.000.000,00	125	52.000.000,00	BPKPAD	

5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				805.000.000,00		832.000.000,00		859.000.000,00		886.000.000,00		913.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase nilai pemanfaatan aset daerah terhadap PAD	0.55	1.0	805.000.000,00	1.2	832.000.000,00	1.5	859.000.000,00	1.7	886.000.000,00	2.0	913.000.000,00	BPKPAD	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0.10	0.16		0.17		0.18		0.19		0.2		BPKPAD	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				805.000.000,00		832.000.000,00		859.000.000,00		886.000.000,00		913.000.000,00	BPKPAD	
Jumlah Peningkatan pemanfaatan aset terhadap pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	35.000.000,00	2	38.000.000,00	2	41.000.000,00	2	44.000.000,00	2	47.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	30.000.000,00	2	32.000.000,00	2	34.000.000,00	2	36.000.000,00	2	38.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	45	48	85.000.000,00	48	87.000.000,00	48	89.000.000,00	48	91.000.000,00	48	93.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	235.000.000,00	1	237.000.000,00	1	239.000.000,00	1	241.000.000,00	1	243.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	4	12.000.000,00	4	14.000.000,00	4	16.000.000,00	4	18.000.000,00	4	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00	1	69.000.000,00	1	71.000.000,00	1	73.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	90.000.000,00	1	92.000.000,00	1	94.000.000,00	1	96.000.000,00	1	98.000.000,00	BPKPAD	

	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	110.000.000,00	1	112.000.000,00	1	114.000.000,00	1	116.000.000,00	1	118.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	2	12.000.000,00	2	14.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	5	95.000.000,00	5	97.000.000,00	5	99.000.000,00	5	101.000.000,00	5	103.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				35.000.000,00		38.000.000,00		41.000.000,00		44.000.000,00		47.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	35.000.000,00	2	38.000.000,00	2	41.000.000,00	2	44.000.000,00	2	47.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	30.000.000,00	2	32.000.000,00	2	34.000.000,00	2	36.000.000,00	2	38.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	2	12.000.000,00	2	14.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				235.000.000,00		237.000.000,00		239.000.000,00		241.000.000,00		243.000.000,00	BPKPAD	

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	235.000.000,00	1	237.000.000,00	1	239.000.000,00	1	241.000.000,00	1	243.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				90.000.000,00		92.000.000,00		94.000.000,00		96.000.000,00		98.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	90.000.000,00	1	92.000.000,00	1	94.000.000,00	1	96.000.000,00	1	98.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		71.000.000,00		73.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00	1	69.000.000,00	1	71.000.000,00	1	73.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				95.000.000,00		97.000.000,00		99.000.000,00		101.000.000,00		103.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	5	95.000.000,00	5	97.000.000,00	5	99.000.000,00	5	101.000.000,00	5	103.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	BPKPAD	

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	4	12.000.000,00	4	14.000.000,00	4	16.000.000,00	4	18.000.000,00	4	20.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				110.000.000,00		112.000.000,00		114.000.000,00		116.000.000,00		118.000.000,00	BPKPAD	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	110.000.000,00	1	112.000.000,00	1	114.000.000,00	1	116.000.000,00	1	118.000.000,00	BPKPAD	
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				85.000.000,00		87.000.000,00		89.000.000,00		91.000.000,00		93.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	45	48	85.000.000,00	48	87.000.000,00	48	89.000.000,00	48	91.000.000,00	48	93.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.391.000.000,00		1.416.000.000,00		1.442.000.000,00		1.468.000.000,00		1.494.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100	175.000.000,00	100	180.000.000,00	100	186.000.000,00	100	192.000.000,00	100	198.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				175.000.000,00		180.000.000,00		186.000.000,00		192.000.000,00		198.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya data potensi PAD yang valid dan konferenshif	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	3	100.000.000,00	3	102.000.000,00	3	104.000.000,00	3	106.000.000,00	3	108.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	16	25.000.000,00	16	26.000.000,00	16	28.000.000,00	16	30.000.000,00	16	32.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	6	50.000.000,00	6	52.000.000,00	6	54.000.000,00	6	56.000.000,00	6	58.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				25.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00	BPKPAD	

Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	16	25.000.000,00	16	26.000.000,00	16	28.000.000,00	16	30.000.000,00	16	32.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				100.000.000,00		102.000.000,00		104.000.000,00		106.000.000,00		108.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	3	100.000.000,00	3	102.000.000,00	3	104.000.000,00	3	106.000.000,00	3	108.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	6	50.000.000,00	6	52.000.000,00	6	54.000.000,00	6	56.000.000,00	6	58.000.000,00	BPKPAD	
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	80	100	46.000.000,00	100	48.000.000,00	100	50.000.000,00	100	52.000.000,00	100	54.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				46.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya laporan pendapatan yang akurat dan transparan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	1	46.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				46.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	1	46.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	BPKPAD	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9.00	10.70	1.170.000.000,00	11.50	1.188.000.000,00	12.00	1.206.000.000,00	12.70	1.224.000.000,00	13.00	1.242.000.000,00	BPKPAD	

5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.170.000.000,00		1.188.000.000,00		1.206.000.000,00		1.224.000.000,00		1.242.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya data potensi PAD yang valid dan konferensif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	86.000.000,00	2	88.000.000,00	2	90.000.000,00	2	92.000.000,00	2	94.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	5	240.000.000,00	4	242.000.000,00	4	244.000.000,00	4	246.000.000,00	4	248.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60.000	62.000	25.000.000,00	63.000	27.000.000,00	64.000	29.000.000,00	65.000	31.000.000,00	70.000	33.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4	9	83.000.000,00	9	85.000.000,00	9	87.000.000,00	9	89.000.000,00	9	91.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	9	160.000.000,00	9	162.000.000,00	9	164.000.000,00	9	166.000.000,00	9	168.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	55.000.000,00	2	57.000.000,00	2	59.000.000,00	2	61.000.000,00	2	63.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	11	21.000.000,00	11	23.000.000,00	11	25.000.000,00	11	27.000.000,00	11	29.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	9	10.000.000,00	9	11.000.000,00	9	12.000.000,00	9	13.000.000,00	9	14.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	9	480.000.000,00	9	482.000.000,00	9	484.000.000,00	9	486.000.000,00	9	488.000.000,00	BPKPAD	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	3	10.000.000,00	3	11.000.000,00	3	12.000.000,00	3	13.000.000,00	3	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				55.000.000,00		57.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00		63.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	55.000.000,00	2	57.000.000,00	2	59.000.000,00	2	61.000.000,00	2	63.000.000,00	BPKPAD	

5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	3	10.000.000,00	3	11.000.000,00	3	12.000.000,00	3	13.000.000,00	3	14.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				86.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00		92.000.000,00		94.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	86.000.000,00	2	88.000.000,00	2	90.000.000,00	2	92.000.000,00	2	94.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				240.000.000,00		242.000.000,00		244.000.000,00		246.000.000,00		248.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	5	240.000.000,00	4	242.000.000,00	4	244.000.000,00	4	246.000.000,00	4	248.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				160.000.000,00		162.000.000,00		164.000.000,00		166.000.000,00		168.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	9	160.000.000,00	9	162.000.000,00	9	164.000.000,00	9	166.000.000,00	9	168.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		31.000.000,00		33.000.000,00	BPKPAD	

Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60.000	62.000	25.000.000,00	63.000	27.000.000,00	64.000	29.000.000,00	65.000	31.000.000,00	70.000	33.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	11	21.000.000,00	11	23.000.000,00	11	25.000.000,00	11	27.000.000,00	11	29.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				83.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00		89.000.000,00		91.000.000,00	BPKPAD	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4	9	83.000.000,00	9	85.000.000,00	9	87.000.000,00	9	89.000.000,00	9	91.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				480.000.000,00		482.000.000,00		484.000.000,00		486.000.000,00		488.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	9	480.000.000,00	9	482.000.000,00	9	484.000.000,00	9	486.000.000,00	9	488.000.000,00	BPKPAD	
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	BPKPAD	
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	9	10.000.000,00	9	11.000.000,00	9	12.000.000,00	9	13.000.000,00	9	14.000.000,00	BPKPAD	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	

			Kegiatan	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan	

			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	
			Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	

			5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya penerapan system informasi pengelolaan PAD berbasis digital	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	

		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya penerapan system informasi pengelolaan PAD berbasis digital	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BPKPAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH									
2.	Nilai IPKD	Nilai	72,96	73	74	75	76	77	78	
3.	Nilai SAKIP BPKPAD	Nilai	70	72	75	78	80	82	85	

4.	Persentase Aset Daerah yang Telah Terdata dan Tervalidasi dalam SIM-BMD	%	70	75	80	85	90	95	100	
5.	Persentase Ketepatan Pengalokasian Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Aset Idle Dimanfaatkan	%	0	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	
7.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	13	14	15	16	17	18	19	
8.	Indeks Kemandirian Fiskal	%	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada BPKPAD	%	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap APBD	%	97,40	97,60	97,70	97,80	97,90	98,10	98,20	
11.	Persentase Nilai Aset yang Memiliki Legalitas (Sertifikat)	%	5,38	5,43	15,22	36,41	57,61	84,24	100	
12.	Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	negatif	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
4.	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	negatif	%	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	5,0	
5.	Rasio PAD	positif	%	6:8	7:9	8:10	9:11	10:12	11:13	12:14	
6.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	negatif	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
7.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	negatif	%	33:33	30:30	29:29	28:28	27:27	26:26	25:25	
8.	Manajemen Aset	positif	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
9.	Opini Laporan Keuangan	komulatif	%	9	10	11	12	13	14	15	
10.	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	negatif	%	61	60	58	56	54	52	50	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah periode tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahun dimana berisi tujuan, sasaran, indikator outcome, indikator output yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD, yakni menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di Bagian Keuangan.

Rencana strategis perangkat daerah dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025-2029 mulai dari visi, misi kepala daerah sampai pada isu strategis, permasalahan, sasaran, tujuan, program prioritas dan lain sebagainya.

Sebagai dokumen induk perencanaan maka akan digunakan untuk menyusun Renja (Rencana Kerja) BPKPAD setiap tahunnya dan menjadi pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang maupun bagian di BPKPAD.

BPKPAD Mamuju Tengah mengampuh misi yang ketiga yakni “Memperkuat Transformasi Tata Kelola” diharapkan dengan adanya dokumen Renstra ini dapat diimplementasikan oleh semua jajaran yang ada di BPKPAD, dimana kolaborasi, integarsi serta tanggung jawab sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam mendukung visi misi Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada akhirnya segala sesuatu harus dilaksanakan dengan tindakan nyata karena rencana strategis saja tidaklah cukup. Mari bekerja dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tujuan, pokok dan fungsi masing-masing bidang/bagian.



Mamuju Tengah, 31 Oktober 2025
Kepala BPKPAD Kab. Mamuju Tengah

MANSYAH, S.Kom., MM
NIP. 198001012009011025